



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kebumen Tahun 2024 selesai disusun.

Tujuan dari LKjIP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen selama tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pertama, indikator indeks SPBE dari target 3,50 terealisasi 4,07 (116,28%) atau sangat baik. Kedua, untuk indikator persentase OPD yang mengisi *website* Satu Data, tercapai 100,00% (baik). Ketiga, indikator persentase desa dan kelurahan yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam layanan administrasi pemerintahan desa/kelurahan dari target 83,43% tercapai 94,35% (113,08%) atau sangat baik.

Berdasarkan capaian di atas, maka kinerja Dinas Kominfo Tahun 2024 masuk interval lebih dari 100% (kriteria sangat baik). Capaian kinerja ini dapat menjadi modal untuk peningkatan kinerja instansi di masa mendatang. Untuk melihat kinerja secara rinci dapat dilihat dalam Buku Laporan ini.

Semoga LKjIP Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Kebumen, 23 Januari 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN



SUKAMTO, S.Sos. M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.

196912241990011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Gambaran Umum Organisasi	6
1.2. Fungsi Strategis.....	13
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi	21
1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1. Perencanaan Strategis	23
2.2. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	54
BAB IV	59
PENUTUP	59
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	59
4.2. Permasalahan/Kendala	59
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sumber Daya ASN.....	12
Tabel 1.2 Identifikasi Faktor Kunci.....	14
Tabel 1.3 Faktor Kunci Keberhasilan (CSF)	15
Tabel 1.4 Pohon Kinerja Dinas Kominfo	16
Tabel 1..5 Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo.....	20
Tabel 1.6 Permasalahan Dinas Kominfo.....	21
Table 1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP 2024	22
Tabel 2 1 Rencana Program dan Kegiatan	26
Tabel 2 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo	28
Tabel 2.3 Target Indikator Sasaran Strategis 2024.....	29
Tabel 2 4 Indikator dan Target Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2024	30
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel 3. 2 Kinerj Dinas Kominfo Tahun 2024	34
Tabel 3. 3 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	36
Tabel 3. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	37
Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	39
Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	40
Tabel 3. 7 Data Realisasi Anggaran TA. 2024.....	55
Tabel 3. 8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	58
Tabel 4 1 Permasalahan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Bagan Susunan Organisasi	8
Gambar 1 2 Pohon Kinerja Dinas Kominfo	19
Gambar 3 1 Perbandingan Capaian Indeks SPBE 2024	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas, Pokok, dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

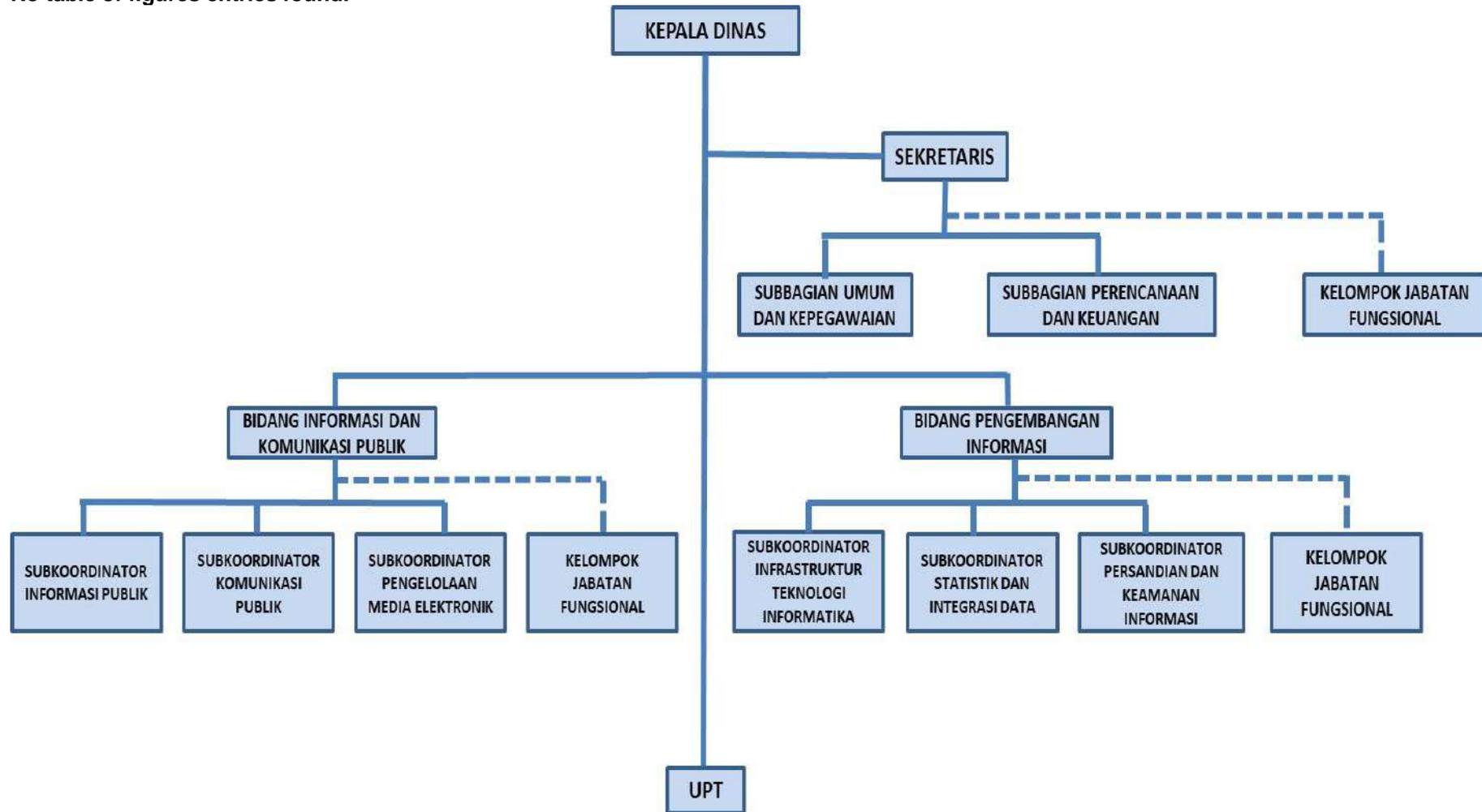
2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 tahun 2021

terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - 1) Subkoordinator Informasi Publik;
 - 2) Subkoordinator Komunikasi Publik; dan
 - 3) Subkoordinator Pengelolaan Media Elektronik;
- d. Bidang Pengembangan Informatika, terdiri atas:
 - 1) Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informatika;
 - 2) Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data; dan
 - 3) Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

No table of figures entries found.



Gambar 1 1 Bagan Susunan Organisasi

3. Uraian Tugas

Masing-masing unsur dari organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen memiliki tugas pokok sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi informasi dan komunikasi publik.

Susunan organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi

Publik. Subkoordinator terdiri atas:

- 1) Subkoordinator Informasi Publik; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang informasi publik.
- 2) Subkoordinator Komunikasi Publik; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang komunikasi publik.
Subkoordinator Pengelolaan Media Elektronik.
- 3) Subkoordinator Pengelolaan Media Elektronik; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan media elektronik.

c. Bidang Pengembangan Informatika

Bidang Pengembangan Informatika di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan informatika.

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pengembangan Informatika dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Informatika. Subkoordinator terdiri atas:

- 1) Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informatika. Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informatika.
- 2) Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data. Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang statistik dan integrasi data.

- 3) Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi. Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang persandian dan keamanan informasi.

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

4. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur. Jumlah pegawai yang bekerja sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang Apratur Sipil Negara dan 49 (empat puluh sembilan) Petugas Penunjang Kegiatan (P2K).

Tabel 1.1. Sumber Daya ASN

JABATAN	GOLONGAN				PENDIDIKAN				JML	
		II	III	IV	IX	SLTA	D3	D4/S1		S2
Kepala Dinas				V					V	1
Sekretariat				V					V	1
• Sekretaris										
• Subbagian Umum dan Kepegawaian			V					V		1
• Subbagian Perencanaan dan Keuangan			V					V		1
• Jabatan Fungsional Umum		V	V			V	V			2
• Bidang Informasi Publik										
• Kepala Bidang			V					V		
• Subkoordinator Informasi Publik			V						V	1
• Subkoordinator Komunikasi Publik										
• Subkoordinator Pengelolaan Media Elektronik			V					V		1
• Jabatan Fungsional Tertentu		V	V			V		V		4
Bidang Pengembangan Informatika										2
• Kepala Bidang			V					V		1
• Subkoordinator Infrastruktur dan Teknologi			V					V		1
• Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data										
• Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi										
• Jabatan Fungsional Tertentu	V	V	V				V	V		6
Total										22

1.2. Fungsi Strategis

Tahun 2024 merupakan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Tujuan jangka menengah Dinas Kominfo Kab. Kebumen adalah:

- a. Terwujudnya birokrasi yang kapabel, dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 indeks SPBE sebesar 3,42 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau Indeks SPBE sebesar 3,60;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,5 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau indeks kepuasan masyarakat sebesar 86;
- c. Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 Nilai SAKIP sebesar 64,00 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai sebesar 77,00.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Kominfo Kab. Kebumen adalah:

- a. Meningkatnya tata kelola SPBE, dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 indeks SPBE sebesar 3,42 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau Indeks SPBE sebesar 3,60;
- b. Meningkatnya pengelolaan *website* satu data, dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 persentase OPD yang mengisi *website* Satu Data sesuai SOP sebesar 100% dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan juga mencapai 100%.
- c. Meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi, dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 persentase desa/kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam layanan administrasi desa/kelurahan sebesar 16,74% dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan sebesar 100%.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo Kab. Kebumen, akan diperoleh Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya tata kelola SPBE, dengan meningkatnya kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE;
- b. Meningkatnya pengelolaan *website* satu data, dengan meningkatnya pengelolaan *website* satu data diharapkan akan meningkatkan integrasi dan pemanfaatan data yang holistik di Kabupaten Kebumen;
- c. Meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi, dengan meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor/CSF*) Dinas Kominfo Kab.Kebumen berdasarkan Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Identifikasi Faktor Kunci

Ultimate Outcome	Outcome	CSF (Intermediete Outcome)
Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Meningkatnya tata kelola SPBE	Meningkatnya nilai domain layanan SPBE dalam penilaian indeks SPBE
		Meningkatnya Indeks PPID
		Meningkatnya cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Meningkatnya persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan

Dari Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan dapat diuraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional sebagai berikut:

Tabel 1.3 Faktor Kunci Keberhasilan (CSF)

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya nilai domain layanan SPBE dalam penilaian indeks SPBE	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan <i>e-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya indeks PPID	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah untuk merumuskan Indikator Kinerja (Pohon Kinerja).

Tabel 1.4 Pohon Kinerja Dinas Kominfo

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
Terwujudnya birokrasi yang kapabel				Indeks SPBE
	Meningkatnya tata kelola SPBE			Indeks SPBE
		Meningkatnya nilai domain layanan SPBE dalam penilaian indeks SPBE		Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE
			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur
			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE
		Meningkatnya indeks PPID		Indeks PPID
			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik
		Meningkatnya cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		
			Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data			Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP
		Meningkatnya persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP		Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP
			Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel				Nilai SAKIP
	Meningkatnya layanan administrasi desa yang			Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan

	berbasis teknologi informasi			
		Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan		Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan
			Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan

Berdasarkan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen menunjukkan tidak adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

Monitoring atas Rencana Aksi Kinerja secara berkala dan Evaluasi atas keberhasilan capaian kinerja diperlukan untuk mengetahui indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen telah tercapai. Pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan Rakor POP/K. Pelaksanaan seluruh rencana perbaikan/penyesuaian strategi atau kebijakan yang berdampak besar dalam mencapai kinerja berikutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1..5 Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur layanan pemerintahan yang mendukung penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> • Penyusunan dokumen proses bisnis yang merupakan dokumen yang mengintegrasikan proses bisnis seluruh sistem elektronik di internal Pemda • Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia
2.	Peningkatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan desiminasi data statistik daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan desiminasi data statistik daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif
3.	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelaksanaan manajemen keamanan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan berbasis elektronik dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi • Peningkatan penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Pelayanan Dinas Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tidak lepas dari berbagai permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (PD) merupakan hasil analisis Gambaran Pelayanan PD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PD, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel 1.6 Permasalahan Dinas Kominfo

Urusan	Permasalahan
Urusan Komunikasi dan Informatika	1) Pedoman formal untuk manajemen SPBE belum optimal karena belum ada rujukan dan panduan yang jelas (perencanaan dan pelaksanaan, manajemen kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan TIK); 2) Belum adanya <i>tools</i> /alat bantu untuk proses Manajemen Layanan TIK, sehingga layanan TIK yang ada belum dapat termonitor dengan jelas.
Urusan Statistik	Kegiatan Forum Satu Data Kebumen belum optimal;
Urusan Persandian	1) Tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi masih rendah; 2) Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai di tingkat desa dapat menghambat penggunaan tanda tangan elektronik;

1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan hasil rekomendasi evaluasi AKIP 2024 telah kami tindaklanjuti sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.7.

Table 1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah Lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Kami telah melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja. Kesimpulannya tidak ditemukan <i>crosscutting</i> kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.
2	Memanfaatkan hasil dari pengukuran kinerja untuk pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kami telah menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu pemberian penghargaan sebagai pegawai teladan kepada pegawai berkinerja baik • pembinaan oleh atasan kepada pegawai (<i>staff meeting</i>) seminggu sekali agar kinerja optimal
3	Monitoring atas Rencana Aksi Kinerja secara berkala	Melaksanakan Kegiatan RAKOR POP/K tiap triwulan yang menyajikan capaian rencana aksi kinerja dan capaian IKU yang dilaporkan melalui SIMDALEV
4	Evaluasi atas keberhasilan capaian kinerja	Kami telah memanfaatkan informasi LkjIP sebagai bahan penyesuaian strategi/kebijakan yang berdampak besar dalam mencapai kinerja berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan dengan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka Dinas Kominfo berpedoman pada dokumen Renstra Tahun 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2.1.1. Rencana Strategis

Untuk mencapai tujuan suatu perencanaan, diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen periode 2021-2026. Terkait penganggaran bagi kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tersebut, akan selalu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan seperti telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

2.1.2. Reviu terhadap Visi Misi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan- tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi juga merupakan suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh di masa yang akan datang. Dalam rangka melaksanakan amanat RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 Visi Kabupaten Kebumen adalah “Mewujudkan Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Mandiri, dan Berahlak Bersama Rakyat”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut

dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera; yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri; mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai

produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak; menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi;
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dari kelima Misi tersebut maka misi yang terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yaitu misi kesatu, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026 dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan terwujudnya birokrasi yang kapabel yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026.

a) Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026, maka ditetapkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2 1 Rencana Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan	Subkegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
	Kepegawaian Perangkat Daerah	5. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		9. Penyediaan Bahan Bacaan dan

		Peraturan Perundang-undangan
		10. Penyediaan Bahan/Material
		11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		17. Pemeliharaan Mebel
		18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		19. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		21. Pelayanan Informasi Publik
		22. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 25. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		28. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b) Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan urusan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis. IKU pada masing-masing urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kebumen sebagai berikut:

Tabel 2 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo

Urusan	IKU
Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE
Statistik	Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> satu data sesuai SOP
Persandian	Persentase desa yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi desa

c) Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target Indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Indikator Sasaran Strategis 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	3,50
Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> satu data sesuai SOP	100%
Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase desa yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi desa	83,48%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang berpedoman pada IKU dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen 2021-2026.

Tabel 2 4 Indikator dan Target Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2024

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	85				85
	Sasaran :								
	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	%	100	100				100
	Tujuan :								
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71	71				71
	Sasaran :								
	Meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa/kelurahan	%	83,48	83,48				83,48
	Tujuan :								
3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,50	3,50				3,50
	Sasaran :								
	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,50	3,50				3,50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Sumber : PermenPANRB No.54 Tahun 2014

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas

pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2 Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,50	4,07	116,28	Sangat Baik	KepmenPAN-RB nomor 663 Tahun 2024
2	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	Baik	Diskominfo Kab. Kebumen
3	Meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa/Kelurahan	%	83,48	94,35	113,02	Sangat Baik	Diskominfo Kab. Kebumen
Kinerja Organisasi (Rata-Rata Nilai)						109,76	Sangat Baik	Data diolah dari standar PermenPANRB No.54 Tahun 2014

Capaian indikator sasaran meningkatnya indeks SPBE 116,28% dari target nilai indeks SPBE 3,50 (kategori baik) terealisasi 4,07 (sangat baik). Ketersediaan infrastruktur SPBE dan terdapatnya regulasi terkait implementasi SPBE merupakan faktor pendorongnya.

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator sasaran meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi dari 94,35%, dari target 384 desa/kelurahan terealisasi 434 desa/kelurahan yang sudah menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa. Sosialisasi pentingnya Keamanan Informasi telah meningkatkan jumlah desa/kelurahan mempunyai SSL (*Secure Socket Layer*) yang digunakan untuk menciptakan koneksi yang lebih aman antara *website* dan *browser*.

2. Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 3 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	3,43	3,44	100,30	3,45	3,70	107,24	3,50	4,07	116,28
2.	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	38,91	39,56	101,67	61,30	70,65	115,25	83,48	94,35	113,02

Bila dilihat dari tabel 3.3., capaian indikator kinerja Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa mengalami peningkatan dari 17,39% pada tahun 2021 menjadi 94,35% pada tahun 2024. Capaian indikator kinerja Indeks SPBE juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai indeks SPBE 3,05 menjadi 4,07 pada tahun 2024.

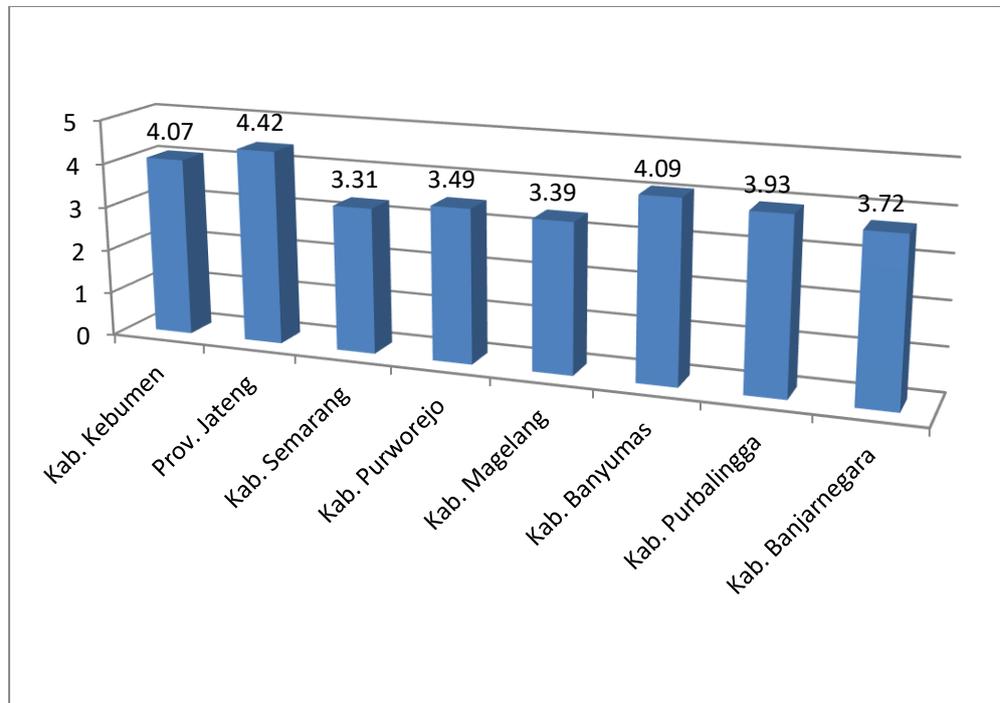
3. Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	4,07	3,60	116,28
2.	Meningkatnya pengelolaan website satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya layanan administrasi desa/kel. yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	94,35	100,00	113,02

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sudah sangat baik. Capaian Indeks SPBE jika dibandingkan dengan Provinsi

Jawa Tengah dan beberapa Kabupaten di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3 1 Perbandingan Capaian Indeks SPBE 2024

Berdasarkan Gambar di atas, perbandingan capaian Indeks SPBE Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah Provinsi Semarang adalah lebih rendah (8,60%), jika dibandingkan dengan Pemkab Purworejo capaian indeks Kabupaten Kebumen lebih tinggi 14,25% dan 2,11% lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara.

4. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	3,50	4,07	116,28	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman formal untuk manajemen SPBE belum optimal karena belum ada rujukan dan panduan yang jelas; • Belum adanya <i>tools</i>/alat bantu untuk layanan TIK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginisiasi penyusunan pedoman formal manajemen formal; • Mengembangkan atau mengadopsi <i>tools</i> berbasis teknologi untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi layanan TIK
2	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	Kegiatan Forum Satu Data Kebumen belum optimal	Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam tata kelola Satu Data Indonesia
3	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	83,48	94,35	113,02	Kesadaran dan pemahaman terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi masih rendah	Sosialisasi pentingnya Keamanan Informasi

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Indeks SPBE		Indeks SPBE	116,28%	Menunjang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 kegiatan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 unit	Menunjang
		Kegiatan Penyediaan	Jumlah bulan Kegiatan	12 bulan	Menunjang

No	Sasaran	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Program/Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
		Daerah			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Menunjang
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	100%	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	176 PPID OPD dan desa	Menunjang
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	127,98%	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	10 paket	Menunjang

		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	100	Menunjang
2	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data		Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100%	Menunjang
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100%	Menunjang
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1 dokumen	Menunjang
3	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi		Persentase desa yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi desa	113,02%	Menunjang
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase desa yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi desa	113,02%	Menunjang

	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	434 desa dan kelurahan	Menunjang
--	---	---	------------------------	-----------

Adapun untuk capaian kegiatan, dari 12 kegiatan terdapat 11 kegiatan yang capaian kinerjanya 100% dan 1 kegiatan yang capaiannya 113,02% yakni Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Target kinerja kegiatan adalah target pada DPA dan DPPA TA 2024. Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 dokumen realisasi 10 dokumen yaitu Renja TA 2025, RKA TA 2024, RKAP TA 2024, DPA TA 2024, DPPA TA 2024, LKJIP TA 2024, LPPD TA 2023, Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen Pengukuran Kinerja, dan Dokumen Rakor POP;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan, target 12 bulan realisasi 12 bulan;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, target 1 kegiatan realisasi 1 kegiatan;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan, meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan material, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target 40 unit realisasi 40 unit yaitu pengadaan *lighting, mic wireless*, baterai kamera, *drone*, LED, *headphone*, laptop, *printer* dan *hardisk* untuk pembuatan *podcast*;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 bulan realisasi 12 bulan. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan 21 unit kendaraan roda 2 dan 11

- unit kendaraan roda 4, pembayaran pajak kendaraan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan rehabilitasi gedung kantor;
8. Kegiatan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik target 176 PPID OPD dan Desa dalam kondisi baik, realisasi 176 PPID OPD dan Desa. Kegiatan ini terbagi dalam 3 sub kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan hasil 11.315 jam siar Kebumen TV dan Radio In FM selama 1 tahun; 2) Pelayanan Informasi Publik dengan hasil 176 PPID OPD dan Desa dalam kondisi baik; dan 3) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Kemitraan dan Media Komunitas dengan realisasi 1 kali pertemuan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat 1 kali) dan 3 kali pertemuan FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional);
 9. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi 10 paket pengadaan, yang terdiri dari pengadaan sewa koneksi internet untuk koneksi IP transit (utama), pengadaan sewa koneksi internet untuk koneksi IP transit (*redundant*), pengadaan jasa *maintenance tower wireles*, pengadaan jasa *maintenance data center*, pengadaan jasa *maintenance link*, Pengadaan jasa *maintenance* tiang *fiber optik*, pengadaan suku cadang peralatan jaringan, dan pengadaan *Personal Computer*;
 10. Kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memelihara 100 aplikasi aktif pendukung SPBE dari target 100 aplikasi. Terdiri dari 2 subkegiatan yakni 1) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik; dan 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah;
 11. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan output menyediakan 1 dokumen statistik sektoral. Terdiri dari 1 subkegiatan yakni Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor;

12. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan output 431 desa dan kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan. Terdiri dari 2 Subkegiatan yaitu 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; 2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penyebab keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024, yaitu komitmen pimpinan yang tinggi dan dukungan dari semua pegawai yang terlibat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Statistik / Satu Data

Implementasi Satu Data di Kabupaten Kebumen telah mencapai langkah signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 tahun 2021. Selain itu, juga telah terbentuk Forum Satu Data Kebumen yang diatur melalui Surat Keputusan Bupati. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan data, Kepala Dinas Kominfo juga menerbitkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data. Inovasi ini melibatkan pembentukan portal resmi satudata.kebumenkab.go.id, yang menjadi sarana utama untuk menampung, mengelola, dan menyebarluaskan data. Portal Satu Data telah dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah (100%) di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menciptakan landasan hukum, kelembagaan, dan infrastruktur digital yang kokoh untuk mewujudkan integrasi dan pemanfaatan data yang holistik di Kabupaten Kebumen.

a) Faktor Pendorong

- 1) Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2021: Adanya Perbup yang mengatur Satu Data Kabupaten Kebumen menjadi pendorong utama untuk implementasi konsep Satu Data. Ini

menciptakan dasar hukum yang kuat untuk penyelenggaraan Satu Data.

- 2) Forum Satu Data Kebumen: Keberadaan SK Bupati yang membentuk Forum Satu Data memberikan wadah formal bagi kolaborasi dan koordinasi antarstakeholder dalam pengelolaan data.
 - 3) Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Penyebarluasan Data: SK Kepala Dinas Kominfo yang mengatur petunjuk teknis memberikan pedoman operasional yang jelas untuk pengelolaan data, meningkatkan efisiensi dan kualitas data.
 - 4) Portal Resmi Satu Data: Adanya portal satudata.kebumenkab.go.id menciptakan infrastruktur digital yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data secara terpusat dan terintegrasi.
- b) Hambatan
- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, SDM, dan teknologi menjadi hambatan utama dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta kegiatan pengelolaan data
 - 2) Tingkat Kesadaran dan Keterlibatan Stakeholder: Rendahnya kesadaran dan keterlibatan beberapa stakeholder terkait dapat menghambat kesuksesan program Satu Data.
 - 3) Kurangnya Koordinasi Antar Instansi: Kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi dapat menghambat integrasi data secara menyeluruh.
- c) Upaya Untuk Meningkatkan
- 1) Optimalisasi Sumber Daya: Meningkatkan alokasi anggaran, peningkatan kompetensi SDM, dan investasi dalam teknologi guna mendukung infrastruktur data yang lebih kuat.
 - 2) Sosialisasi dan Pelibatan Stakeholder: Melakukan program sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk instansi pemerintah,

swasta, dan masyarakat.

- 3) Penguatan Koordinasi Antar Instansi: Membentuk mekanisme koordinasi yang efektif antarinstansi untuk memastikan keselarasan dan kerjasama dalam pengelolaan data.
- 4) Pemantapan Portal Satu Data: Terus melakukan pemantapan dan pengembangan portal Satu Data, termasuk memastikan keamanan data dan penyediaan fitur yang mendukung aksesibilitas dan analisis data yang lebih baik.

2. Tanda Tangan Elektronik Kepala Desa

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen telah diimplementasikan sampai kepala desa, yang dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara sebagai PSrE. Manfaat utama dari penggunaan tanda tangan elektronik bagi kepala desa adalah percepatan layanan administrasi desa melalui aplikasi Desa Online Kebumen. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses administratif, tetapi juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat desa dalam mengajukan berbagai permohonan dan mendapatkan pelayanan secara digital. Dengan demikian, implementasi tanda tangan elektronik menjadi langkah progresif untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Per Januari 2024 sebanyak 431 Kepala Desa dari jumlah total 460 desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen telah diterbitkan tanda tangan elektronik dan dapat diimplementasikan untuk mempercepat pelayanan administrasi desa melalui aplikasi desa *online* kebumen. Sebagai monitoring atas penggunaan tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen dapat diakses melalui <https://sitektonik.kebumenkab.go.id/>.

a) Faktor Pendorong

Faktor pendorong paling utama dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Kebumen adalah komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah hal ini dibuktikan dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Daerah beserta jajarannya untuk menandatangani dokumen elektronik. Selain factor utama tersebut, juga terdapat beberapa faktor pendorong lain:

- 1) Dukungan Regulasi: Adanya dukungan regulasi yang memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik, seperti peraturan yang memfasilitasi legalitas dan pengakuan tanda tangan elektronik, memberikan dasar hukum yang kuat untuk implementasi.
- 2) Kemajuan Teknologi: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pendorong signifikan untuk mengadopsi tanda tangan elektronik, memungkinkan proses administratif menjadi lebih efisien dan modern.
- 3) Kerjasama dengan Instansi Terkait: Kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara menjadi pendorong penting, karena memperkuat dukungan dan pemahaman teknis yang diperlukan untuk implementasi tanda tangan elektronik.

b) Hambatan

- 1) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terkait tanda tangan elektronik dapat menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi ini oleh kepala desa dan masyarakat di Kabupaten Kebumen.
- 2) Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi: Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai di tingkat desa dapat menghambat penggunaan tanda tangan elektronik, memerlukan investasi dalam pembaruan dan peningkatan teknologi.
- 3) Keamanan Data: Keprihatinan terhadap keamanan data dan

kerahasiaan informasi dapat menjadi hambatan, khususnya jika masyarakat atau pemerintah desa merasa kurang yakin terhadap keamanan penggunaan tanda tangan elektronik.

c) Upaya untuk meningkatkan:

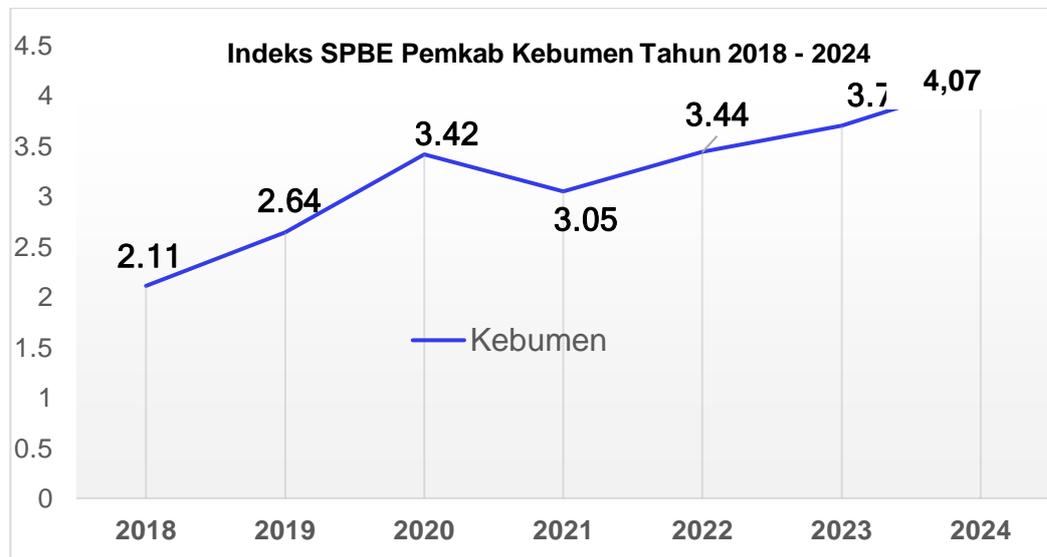
- 1) Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada kepala desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait manfaat dan prosedur penggunaan tanda tangan elektronik.
- 2) Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Investasi dalam peningkatan infrastruktur dan teknologi di tingkat desa untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi tanda tangan elektronik.
- 3) Pengembangan Kebijakan Pendukung: Menyusun kebijakan pendukung yang memastikan keamanan dan validitas tanda tangan elektronik, serta memberikan insentif bagi kepala desa yang mengadopsi teknologi ini.
- 4) Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Memperkuat kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara untuk memberikan dukungan teknis dan regulasi yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun tahapan evaluasi tersebut antara lain Penilaian Mandiri oleh K/L/D/I (Asesor Internal), Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, Penilaian Visitasi, Harmonisasi, Pengumuman Final oleh Asesor Eksternal Kementerian PANRB. Sampai Desember 2024, masih ada ditahap Harmonisasai, sehingga belum ada hasil final (dalam bentuk Keputusan Menpan RB) yang ditetapkan. Sehingga dalam laporan ini menggunakan hasil penilaian dokumen yang dilakukan oleh Asesor Eksternal Kementerian PAN RB.

Indeks SPBE Pemkab Kebumen secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Indeks tahun 2024 (berdasarkan penilaian dokumen oleh Asesor Eksternal Kementerian PAN RB) telah mencapai 4,07 atau predikat Sangat Baik.



Gambar 3.2. Perbandingan Indeks SPBE Pemkab Kebumen & Nasional Tahun 2018-2024

a) Faktor Pendorong

Beberapa faktor pendorong terhadap implementasi SPBE di Kabupaten Kebumen antara lain:

- 1) Implementasi Kebijakan Internal dan Tata Kelola: Adanya kebijakan internal yang mengatur arsitektur, peta rencana, manajemen keamanan informasi, dan audit teknologi informasi menjadi pendorong utama penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 2) Layanan SPBE yang Terintegrasi: Keunggulan dalam integrasi layanan administrasi pemerintahan, kepegawaian, dan layanan publik menggunakan aplikasi berbagi pakai serta aplikasi internal menciptakan ekosistem yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan.

b) Hambatan

Beberapa hambatan yang ada antara lain:

- 1) Kurangnya pedoman formal untuk manajemen SPBE, seperti pedoman kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan;
- 2) Belum adanya *tools*/alat bantu untuk proses Manajemen Layanan TIK, sehingga layanan TIK yang ada belum dapat termonitor dengan jelas;
- 3) Belum tersedianya pedoman formal menyebabkan manajemen SPBE belum berjalan optimal, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan, karena tidak ada rujukan dan panduan yang jelas.

c) Upaya untuk meningkatkan:

- 1) Menginisiasi penyusunan pedoman formal untuk kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, dan manajemen perubahan melalui tim koordinasi SPBE Pemkab Kebumen;
- 2) Mengadopsi standar nasional atau internasional terkait manajemen SPBE dan menyesuaikannya dengan kebutuhan

lokal;

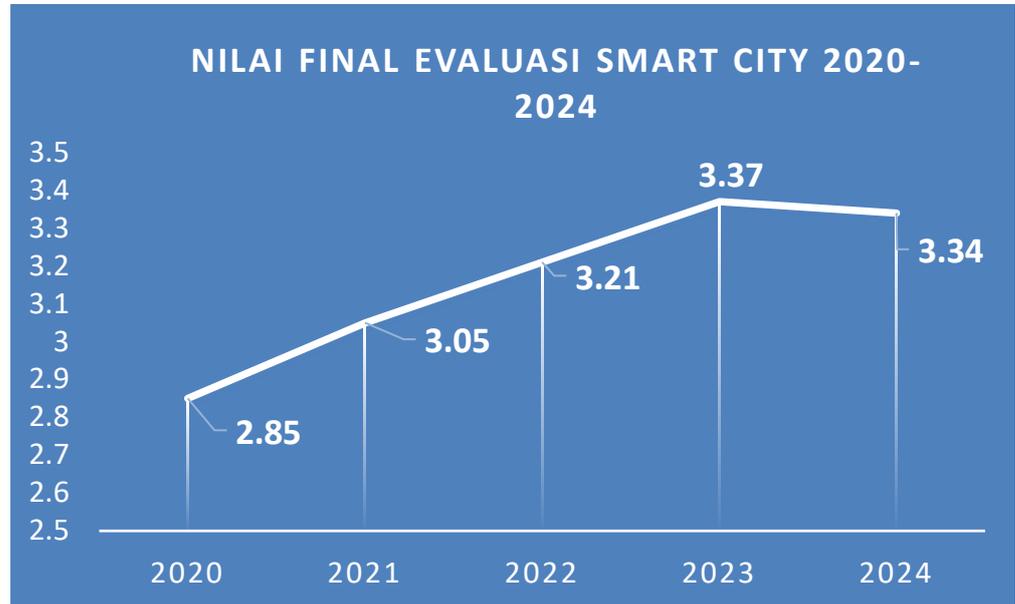
- 3) Mengembangkan atau mengadopsi tools berbasis teknologi untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi layanan TIK;
- 4) Menyusun rencana aksi implementasi pedoman formal Bersama Tim Koordinasi SPBE sebagai bagian dari dokumen perencanaan strategis pemerintah daerah;
- 5) Membentuk mekanisme monitoring berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen SPBE, termasuk penerapan pedoman formal dan penggunaan tools layanan TIK.

Selain melakukan kegiatan yang mendukung IKU Daerah, dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen juga melakukan kegiatan yang mendukung Program Unggulan Bupati yakni *Smart City*. Program *Smart City* merupakan program yang digagas Kementerian Kominfo Bersama Kemendagri, Kementerian PPN/Bappena, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB. Kabupaten Kebumen tahun 2019 masuk dalam Gerakan Menuju 100 Kab/Kota *Smart City*. *Smart City* sendiri merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

Di Kabupaten Kebumen, Program *Smart City* berpedoman pada *masterplan Smart City* yang mana setiap program yang diimplementasikan telah dilakukan *link and match* terhadap program RPJMD Kabupaten Kebumen. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2022 Tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026.

Setiap tahunnya program *Smart City* dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kominfo serta pihak eksternal lain (akademisi, praktisi, professional), untuk melihat sejauh mana implementasi program

Smart City berjalan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi *Smart City* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo, Kabupaten Kebumen setiap tahunnya mengalami *improvement*/kenaikan nilai.



Gambar 3.3 Nilai Final Evaluasi Smart City 2020-2024

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tahun 2024 merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja utama untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran melalui APBD Perubahan tahun 2024 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.855.338.000,- dengan realisasi sebesar Rp10.474.540.945,- dengan persentase capaian 96,49%.

Alokasi anggaran dan realisasi dari masing-masing program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3. 7 Data Realisasi Anggaran TA. 2024

Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.533.097.000	4.246.770.101	93,68
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	23.698.250	98,74
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.859.113.000	2.671.488.830	93,44
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.307.000	156.962.000	80,37
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	79.633.900	99,54
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	442.777.000	436.920.000	98,68
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	563.028.000	516.721.149	91,78
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.872.000	361.345.972	97,96
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.988.963.000	2.963.321.691	99,14
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.988.963.000	2.963.321.691	99,14
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.114.504.000	3.059.992.533	98,25
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.310.798.000	2.261.457.192	97,86
Kegiatan Pengelolaan e-	803.706.000	798.535.341	99,36

Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
<i>government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	55.680.000	51.013.321	91,62
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.680.000	51.013.321	91,62
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	163.094.000	153.443.299	94,08
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	163.094.000	153.443.299	94,08
JUMLAH	10.855.338.000	10.474.540.945	96,49

Berdasarkan tabel 3.8, realisasi keuangan TA 2024 Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen sebesar 96,49%. Dari 5 program, program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang persentase penyerapannya paling tinggi yakni 99,14% dan dari 12 kegiatan, penyerapan tertinggi ada pada kegiatan Pengelolaan *e- government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 99,36% dan terendah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yakni 80,37% karena adanya jasa iklan dan reklame yang tidak dibelanjakan karena penyelenggaraan reklame di LPPL Radio In Fm dan LPPL Kebumen Televisi bukan merupakan objek daerah retribusi menurut Perda No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan realisasi anggaran tersebut, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen adalah 3,51%. Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E = efisiensi

PAKi = pagu anggaran keluaran i

RAKi = realisasi anggaran keluaran i

CKi = capaian keluaran i

Tabel 3. 8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				10.855.338.000	10.474.540.945	96,46	3,51%
	Persentase OPD yang Mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100,00	100,00	100,00				
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel							
	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	83,48	93,70	112,31				
3	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel	3,50	4,07	116,28				
	Meningkatnya Indeks SPBE	3,50	4,07	116,28				

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku. Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen selama tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pertama, indikator indeks SPBE dari target 3,50 terealisasi 4,07 (116,28%) atau sangat baik. Kedua, untuk indikator persentase OPD yang mengisi website Satu Data, tercapai 100,00% (baik). Ketiga, indikator persentase desa dan kelurahan yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam layanan administrasi pemerintahan desa/kelurahan dari target 83,43% tercapai 94,35% (113,08%) atau sangat baik.

Berdasarkan capaian IKU, maka kinerja Dinas Kominfo Tahun 2024 masuk interval lebih dari 100% (kriteria sangat baik). Capaian kinerja ini dapat menjadi modal untuk peningkatan kinerja instansi di masa mendatang.

Tahun 2024 Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen memperoleh Indeks SPBE 4,07 dengan predikat sangat baik. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen melalui LPPL Radio In FM meraih penghargaan dari Anugerah KPID Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai juara 1 Kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Radio terbaik “Dampingi Anak Saat Menonton Televisi” dan Anugerah Media Center 2024.

4.2. Permasalahan/Kendala

Pelayanan Dinas Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tidak lepas dari berbagai permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PD, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel 4 1 Permasalahan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen

Urusan	Permasalahan
Urusan Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman formal untuk manajemen SPBE belum optimal karena belum ada rujukan dan panduan yang jelas (perencanaan dan pelaksanaan, manajemen kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan TIK); • Belum adanya <i>tools</i>/alat bantu untuk proses Manajemen Layanan TIK, sehingga layanan TIK yang ada belum dapat termonitor dengan jelas.
Urusan Statistik	Kegiatan Forum Satu Data Kebumen belum optimal;
Urusan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi masih rendah; • Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai di tingkat desa dapat menghambat penggunaan tanda tangan elektronik;

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Memperhatikan kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 strategi peningkatan kinerja di masa datang adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantapan dan pengembangan portal Satu Data, termasuk memastikan keamanan data dan penyediaan fitur yang mendukung aksesibilitas dan analisis data yang lebih baik;
- 2) Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada kepala desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait manfaat dan prosedur penggunaan tanda tangan elektronik;
- 3) Pengembangan pedoman manajemen SPBE dapat merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti PermenpanRB nomor 5 tahun 2020, Peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021, dan PermenPPN/Bappenas nomor 16,17,18 tahun 2020. Pedoman ini dapat menjadi landasan untuk perencanaan dan pelaksanaan manajemen SPBE yang lebih optimal;
- 4) Implementasi pedoman yang dikembangkan untuk seluruh Perangkat Daerah. Ini akan memastikan keseragaman penerapan dan memenuhi indikator serta kriteria penilaian yang diharapkan di masa mendatang.

Demikian LKjIP Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini disusun. Semoga bermanfaat.

Kebumen, 24 Januari 2024


KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
SUKAMTO, S.Sos, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001